



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ERNA RUSMIYATI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PERBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
3. NHK : 255828

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 828.750.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 92 m²/72 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 201 m²/100 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. Tanah Seluas 615 m² di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp. 153.750.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 124.000.000

1. MOTOR, SUZUKI FU150 Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA VELOZ Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO125 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 90.394.400

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 105.906.997

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.149.051.397

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.149.051.397

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.